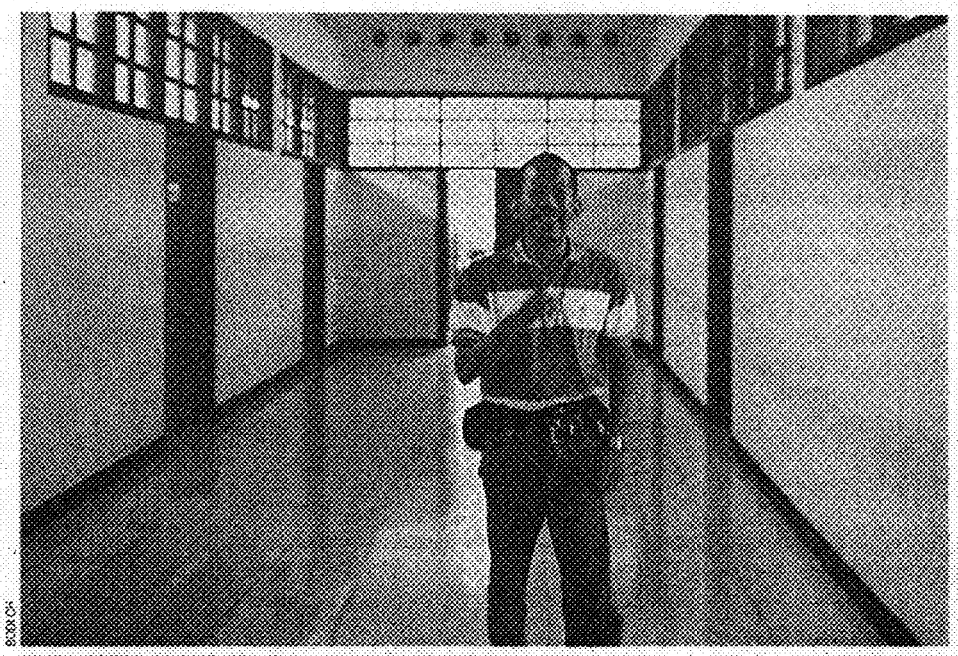


PIUS LUSTRILANANG. Meminta pertanggungjawaban.

Pius di Depan Kongres

Akhirnya, Pius mengungkapkan soal penculikannya dihadapan anggota Kongres Amerika Serikat. Di Jakarta, jadwal pelatihan oleh anggota *green barret* dipercepat.

HAK ASASI ADALAH PERSOALan universal. Tak mengherankan jika perkara penculikan di Indonesia menjadi bahasan menarik bagi masyarakat internasional, termasuk anggota Kongres Amerika Serikat (AS). Maka, Kamis, 7 Mei lalu, Pius Lustrilanang, aktivis yang sempat diculik selama dua bulan, melakukan testimoni di hadapan anggota Subkomite Hubungan Internasional dan Hak Asasi Manusia Kongres AS.

Kehadiran Pius, 30 tahun, di AS merupakan rangkaian dari misinya untuk mengampanyekan gerakan antipenculikan dan penyiksaan di daratan Eropa dan AS, bahkan di beberapa negara lain, seperti Jepang dan Australia. Pius, Sekretaris Jenderal Solidaritas Indonesia untuk Amien dan Mega dan Ketua Aliansi Demokrasi Rakyat, berada di Eropa, Belanda tepatnya, setelah meninggalkan Indonesia pada 27 April lalu.

Bagi yang sudah mengikuti kisah penculikan Pius, kesaksian yang disampaikan di Ruang 2220 Rayburn House, Office Building, Washington DC tersebut tidak banyak yang baru. Ia antara lain bercerita bagaimana dan di mana saat ia diculik, serta perlakuan apa yang dialaminya selama ia berada di tempat penyekapan.

Ia juga menyinggung soal risiko yang mungkin dihadapinya ketika ia memutuskan memberikan kesaksian tentang penculikannya secara terbuka. "Barangkali, keputusan memberikan kesaksian itu bisa mempercepat proses penglepasan terhadap teman-teman saya yang lain," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pius sempat menjelaskan pengertian antara kata *hilang* dan *dihilangkan*. Meskipun keduanya punya arti yang mirip, menurut Pius, kata *dihilangkan* merupakan sebuah bentuk kalimat aktif yang artinya "dibikin hilang". "Syukurlah, saya bukan termasuk orang yang dikategorikan dibikin hilang," kata Pius.

Hal lain yang disinggung lajang kelahiran Palembang ini, pembebasan yang ia alami merupakan hasil dari desakan yang dilakukan berbagai lembaga dalam dan luar negeri, serta hasil dari pemberitaan pers yang luas. "Untuk mereka semua, saya ucapkan terima kasih," katanya.

Pius juga mengingatkan anggota Kongres AS, pembebasannya merupakan bukti nyata bahwa tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia bisa memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Karena itu, kata Pius, masyarakat internasional seharusnya bisa mencegah penculikan dan penyiksaan seperti yang dialaminya terjadi lagi dan meminta pertanggungjawaban dari pelakunya.

Pembatalan Latihan Militer

Meskipun belum ada ketegasan, tampaknya kesaksian Pius di subkomite tersebut sudah menunjukkan efeknya, yakni dengan terbetiknya berita penghentian latihan militer bersama antara 95 anggota Special Forces Group Airborne atau yang lebih dikenal sebagai pasukan elite baret hijau dan pasukan TNI di Indonesia.

Keputusan menghentikan latihan militer kecil bersama tersebut dilakukan mendadak, baru Jumat pekan lalu, 8 Mei. Pentagon atau Departemen Pertahanan AS memerintahkan 17 pelatih dari pasukan baret hijau yang sudah telanjur berada di Indonesia selama sepekan untuk kembali ke pangkalan mereka di Okinawa, Jepang. Rencananya, program latihan bersama ini dilangsungkan selama satu bulan penuh.

Seorang pejabat di Pentagon yang tak mau disebutkan namanya mengatakan kepada kantor berita *Associated Press*, alasan penghentian di tengah jalan program latihan tersebut diambil mengingat situasi keamanan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

"Tindakan tersebut diambil demi keselamatan anggota pasukan itu sendiri dan juga karena tentara Indonesia sedang menghadapi banyak kerusuhan," kata sumber Pentagon tersebut, seperti yang ditulis harian *Washington Post*.

Sumber Pentagon itu juga menekankan bahwa pembatalan ini jangan diartikan sebagai protes pemerintah AS terhadap Indonesia yang banyak dikritik berkaitan dengan kebijaksanaan represifnya. Bahkan, salah seorang anggota Kongres AS, Christopher Smith, dari partai Republik, mengkritik pemerintahnya yang telah melakukan kerja sama latihan militer dengan pemerintah Indonesia.

Rustam F. Mandayun/Bahan: *Associated Press* dan *Washington Post*

Langkah Awal Tim Pencari Fakta

TIM PENCARI FAKTA DARI MARKAS BESAR ABRI yang dibentuk atas perintah Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI dan diketuai oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI Mayor Jenderal mulai bergerak. Langkah awal mereka adalah mengundang semua korban yang pernah diculik. Tapi, baru satu korban yang datang melapor ke Markas Puspom dan itu pun diwakili orang tuanya. Sang korban adalah Andi Arief, aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi.

Tim itu pada Jumat, 8 Mei 1998, juga datang ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Di sana, mereka bertemu dengan tim tuan rumah sekitar dua setengah jam. Dalam acara tertutup ini, tim ABRI lebih tampil sebagai pendengar.

Pertemuan itu pada garis besarnya membahas laporan yang diperoleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang orang yang hilang. Lalu, kedua tim mencocokkan secara yuridis-formal penemuan-penemuan mereka. Dibahas juga soal orang hilang yang kabarnya telah dilepas, Sonny dan Yani Avri, tapi kenyataannya belum kembali ke rumah orang tuanya.

Detasemen polisi militer (denpom) tampaknya tak ingin buang-buang waktu. Seperti kata Syamsu D., mereka ingin secepatnya menguak kasus-kasus penculikan agar Indonesia tidak terus menjadi sorotan internasional. Tampaknya, itu sebabnya Denpom Lampung telah merekonstruksi penculikan Andi Arief kendati pelakunya belum jelas.

Anggota Denpom Lampung Letnan Satu Edi Purnomo pada Selasa, 5 Mei lalu, mendatangi kediaman Andi Arief untuk mengambil gambar lokasi alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tersebut "diambil". "Saya mengantarkannya ke rumah kakak tertua Andi Arief," ucap Arief Mahya, ayah Andi. Rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan Andi yang sebelumnya telah diperiksa Puspom ABRI.

Rekonstruksi yang masih terlalu dini itu kemudian dipersoalkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Mereka juga mempermasalahkan perampasan surat Andi Arief oleh polisi yang ditujukan kepada masyarakat. Setelah diproses, polisi akhirnya mengizinkan Andi menulis ulang surat tersebut.



SYAMSU D. DI KOMNAS HAM. Tampil sebagai pendengar.

Dalam suratnya, Andi menyarankan agar Panglima ABRI, Puspom ABRI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan kelompok independen pencari orang hilang memanggil Letnan Kolonel Lubis dari Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri). Sebab, Lubislah yang bertanggung jawab dalam serah-terima Andi dari penculik ke Mabes Polri. Andi juga menyebut menolak diperiksa, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Sebabnya, ia melihat indikasi yang mengarah ke penghapusan jejak penculik dirinya. Tapi, ia bersedia diperhadapkan secara terbuka dengan Lubis di depan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Puspom ABRI, dan kelompok independen.

Masih minggu lalu, Kontras juga mendesak Megawati Soekarnoputri selaku pimpinan PDI untuk mengungkap informasi tentang hilangnya Haryanto Taslam. Dalam surat bertanggal 8 Mei 1998 yang ditandatangani Mulyana W. Kusumah (dewan penasihat) dan Munir (badan pekerja), Kontras mengatakan masyarakat sangat berharap Taslam akan menceritakan segala pengalamannya selama hilang.

Laporan Budi Nugroho dan Tarma Siboro

Yang Pernah Hilang yang Kini Jadi Doktor

LUCAS DA COSTA RESMI MENYANDANG GELAR doktor setelah mempertahankan disertasinya, "Analisis Pengaruh Konfigurasi Organisasi terhadap Tingkat Excellence", di Universitas Airlangga, Surabaya, pada 6 Mei lalu. Putra Timor Timur ini dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan. Dengan demikian, dialah doktor pertama asal Timor Timur di Universitas Airlangga. Sebagai tanda sukacita, Ikatan Mahasiswa-Pelajar Timor Timur (IMPETTU) menghadiahi dia sebuah karangan bunga.

Ada rasa haru yang lebih di Aula Pascasarjana Universitas Airlangga sesudah Lucas dinyatakan lulus oleh tim penguji. Penyebabnya: dia menjadi doktor di saat cerita tentang orang hilang ramai dibicarakan orang. Ayah Nani Rolanda Paula da Cruz e Costa dan Liberto Guerra Maria da Costa ini pun pernah juga diculik dan hilang. Keluarga dan kawan-kawannya di IMPETTU pernah kehilangan jejaknya dan mencari ke mana-mana. Namun, waktu muncul kembali, Lucas hanya mengatakan habis dirampok, bukan diculik hilang. "Ya, saya korban, pernah dirampok. Tapi, saya enggak apa-apa. Saya kehilangan satu mobil beserta isinya. Tapi, kan, saya mendapatkan doktornya. Jadi, pas. Saya tidak merasa kehilangan apa-apa," ujarnya.

Setelah penculikan, Lucas memilih untuk menutup mulut. Pengaduan keluarganya ke Lembaga Bantuan Hukum Surabaya juga ditarik dua minggu kemudian. "Mungkin, dia sudah punya komitmen soal itu," kata Yudi Burhan, Ketua Divisi Hak Sipil dan Politik Lembaga Bantuan Hukum Surabaya.

Lucas lahir di Timor Timur pada 11 Januari 1952. Selulus dari Sekolah Kesehatan Dr. Carvallo, Dili, ia mengambil S-1 ekonomi di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dan kemudian S-2 di Universitas Airlangga. Ia pernah memimpin rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, Ketua Tim Palang Merah Internasional, dan Ketua Tim United Nation Children's Fund. Dari 1991 sampai sekarang, ia menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.

Laporan Abdul Manan